



BPOM Grebek Gudang Produk Ilegal Rp 25 M

Jasad Misterius di Baros, Polda Tunggu Hasil Lab



SERANG | TRM

Polda Banten masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk mengungkap identitas jasad yang ditemukan di area perkebunan tanah bengkok milik Desa Panyirapan, tepatnya di Kampung Sikupa, Desa Taman Sari, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Minggu (27/9/2026).

Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea mengatakan, berdasarkan pemeriksaan awal di lokasi, jasad yang ditemukan diketahui berjenis kelamin laki-laki.

"Saat ditemukan, korban mengenakan pakaian lengan pendek tanpa menggunakan celana," ujarnya, Rabu (30/9/2026).

Maruli menjelaskan, setelah ditemukan, jasad tersebut kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Banten untuk menjalani proses identifikasi.

"Untuk identitas korban saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan menunggu hasil laboratorium," jelasnya.

Polda Banten masih melakukan proses identifikasi untuk memas-

» Baca **JASAD**Hal. 7



APBD Perubahan Banten Disetujui RP9,75 Triliun

SERANG | TRM

Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026 resmi mendapat persetujuan DPRD Provinsi Banten. Total proyeksi pendapatan daerah dalam APBD Perubahan 2026 tersebut mencapai Rp9,750 triliun.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, APBD Perubahan 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Menurutnya, pelaksanaan anggaran merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan amanat masyarakat.

"Landasannya adalah RPJMD. Capaian-capaian RPJMD ini merupakan janji atau amanat masyarakat melalui DPRD yang diberikan kepada pemerintah," kata Andra Soni se usai menghadiri Rapat Paripurna Persetujuan DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD Provinsi Banten di Gedung DPRD Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Selasa (29/9/2026).

Setelah memperoleh persetujuan legislatif, Andra Soni menyebutkan Pemprov Banten akan segera menyerahkan draf rancangan tersebut kepada Kementerian Dalam



raha (OPD) dan masyarakat, pemerintah diharapkan dapat menuntaskan seluruh program prioritas," ucap Fahmi.

Berdasarkan laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten yang dibacakan Mohammad Bahri, total proyeksi pendapatan daerah dalam APBD Perubahan 2026

Negeri (Kemendagri) untuk menjalani proses evaluasi.

Ia menegaskan, pelaksanaan APBD Perubahan nantinya akan diarahkan pada program-program yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim menyampaikan hal senada. Ia mengatakan, APBD Perubahan 2026 diarahkan untuk melanjutkan berbagai program prioritas yang berorientasi pada kepentingan publik.

"Kami berharap setelah penetapan ini, Gubernur bisa segera berkonsolidasi dengan Kemendagri untuk tahapan evaluasi. Selanjutnya, dalam waktu tiga bulan ke depan, dengan dukungan Organisasi Perangkat Daerah

raha (OPD) dan masyarakat, pemerintah diharapkan dapat menuntaskan seluruh program prioritas," ucap Fahmi.

Berdasarkan laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten yang dibacakan Mohammad Bahri, total proyeksi pendapatan daerah dalam APBD Perubahan 2026

» Baca **APBD**Hal. 7

TANGERANG | TRM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan gudang yang diduga menjadi tempat



penyimpanan dan distribusi obat bahan alam (OBA), obat kuasi, suplemen kesehatan, serta kosmetik ilegal di Kompleks Pergudangan Laksana Business Park, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.



ISTIMEWA

Temuan tersebut berawal dari hasil patroli dan profiling siber BPOM terhadap dugaan penjualan produk tanpa izin edar (TIE) melalui platform online. Hasil pendalaman tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penelusuran di lapangan sejak awal September 2026.

Tim BPOM Pusat bersama Balai POM di Kabupaten Tangerang, dengan dukungan Tim Badan Intelijen Negara (BIN), melakukan pemeriksaan terhadap sarana pergudangan yang diduga digunakan untuk menyimpan dan mendistribusikan berbagai produk ilegal.

Dari hasil pemeriksaan, BPOM menemukan 287 item atau sekitar 459 ribu pieces produk dengan estimasi nilai keekonomian mencapai Rp25 miliar.

Petugas kemudian mengamankan 243 item atau sekitar 436 ribu pieces kosmetik ilegal dan/atau diduga palsu dengan estimasi nilai keekonomian Rp18,9 miliar. Selain itu, ditemukan 44 item atau sekitar 23 ribu pieces obat bahan alam dan suplemen kesehatan ilegal dengan estimasi risiko kerugian masyarakat mencapai Rp6,1 miliar.

Produk yang ditemukan didominasi barang impor dari Tiongkok, Amerika Serikat, dan Australia. Di antaranya obat bahan alam dengan merek Sausando Saka Spirulinum dan Lumbar Spine Cooling Gel.

Selain itu, petugas menemukan sejumlah

» Baca **BPOM**Hal. 7

4 Pasangan Bukan Muhrim Digelandang Satpol PP

RAZIA PENGINAPAN DI KARAWACI DAN NEGLASARI

TANGERANG | TRM

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang mengamankan empat pasangan yang disebut bukan pasangan suami istri dalam operasi penertiban yang digelar di wilayah Kecamatan Karawaci dan Neglasari.

Operasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang.

Kepala Satpol PP Kota Tangerang Teguh Supriyanto mengatakan, petugas

menyasar sejumlah tempat penginapan dalam operasi yang digelar pada Selasa malam.

"Kami kembali melancarkan operasi razia tadi malam dengan menyasar sejumlah penginapan, sela-

» Baca **4 PASANGAN**Hal. 7



Pemkab Tangerang Tegaskan Tak Ada Penyegehan GKPI Rajeg

Pemerintah Kabupaten Tangerang memastikan tidak ada tindakan penyegehan terhadap rumah ibadah Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang.

Kepastian tersebut disampaikan Camat Rajeg, Oman Pariaman, setelah melakukan musyawarah bersama pengurus dan pendeta GKPI di Kantor Kecamatan Rajeg, Senin (28/9/2026).

"Pemerintah Kabupaten

Tangerang memastikan tidak ada penyegehan terhadap rumah ibadah GKPI Rajeg. Kami terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak agar situasi tetap aman, kondusif, serta kerukunan antarumat beragama dapat terus terjaga," ujar Camat



Rajeg Oman.

Oman menegaskan, pemerintah daerah terus mengedepankan dialog, ko-

munikasi, dan koordinasi dengan seluruh pihak dalam menjaga ketertiban serta kerukunan antarumat ber-

agama di Kabupaten Tangerang.

"Pemerintah daerah memastikan setiap persoalan yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan disikapi secara hati-hati, dengan mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjaga suasana yang aman dan kondusif bagi masyarakat," jelasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat maupun seluruh pihak agar tidak mudah terpengaruh informasi yang

» Baca **PEMKAB**Hal. 7

LEGISLATOR

DPRD Kota Tangerang
Soroti Biaya
Pemeriksaan Kesehatan
Pencari Kerja



Anggota Komisi II DPRD Kota Tangerang, Fredyanto.

TANGERANG | TRM

Komisi II DPRD Kota Tangerang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang memastikan biaya pemeriksaan kesehatan bagi pencari kerja tetap terjangkau dan mudah diakses.

Permintaan tersebut ditujukan kepada Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang, terutama untuk mendukung warga yang tengah mengikuti proses rekrutmen dan memiliki Kartu Kuning atau AK-1.

Anggota Komisi II DPRD Kota Tangerang, Fredyanto, mengatakan pemeriksaan kesehatan merupakan salah satu persyaratan yang perlu diperhatikan agar tidak menjadi beban tambahan bagi pencari kerja.

“Kami ingin biaya pemeriksaan kesehatan tidak menjadi hambatan bagi pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Aksesnya harus mudah, informasinya jelas, dan biayanya terjangkau,” ujar Fredyanto saat dihubungi, Senin (28/9/2026).

Menurutnya, sejumlah Puskesmas di Kota Tangerang telah menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan bagi pelamar kerja dengan tarif yang relatif terjangkau.

Namun, ia menilai informasi mengenai jenis pemeriksaan, biaya, serta persyaratan layanan perlu disampaikan secara terbuka. Dengan begitu, pencari kerja dapat mengetahui kebutuhan yang harus dipenuhi sebelum mengikuti proses rekrutmen.

Komisi II DPRD Kota Tangerang juga meminta Pemkot Tangerang memberikan perhatian terhadap pencari kerja dari keluarga kurang mampu.

Pemerintah daerah dinilai dapat mengkaji berbagai skema untuk meringankan beban biaya, seperti subsidi, pembebasan biaya, tarif khusus melalui Puskesmas, maupun kerja sama dengan fasilitas kesehatan.

Fredyanto mengingatkan, biaya pemeriksaan kesehatan maupun persyaratan administrasi jangan sampai membuat warga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan.

“Jangan sampai warga sudah mendapatkan kesempatan kerja, tetapi gagal mengikuti proses rekrutmen hanya karena tidak mampu membayar persyaratan administrasi dan pemeriksaan kesehatan,” katanya.

Menurut Fredyanto, kemudahan akses terhadap persyaratan kerja menjadi bagian penting dalam mendukung masyarakat yang sedang mencari pekerjaan.

Fredyanto juga menilai keberhasilan program Gampang Kerja tidak cukup hanya diukur dari jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia.

Menurutnya, evaluasi program perlu melihat keseluruhan proses, mulai dari pendaftaran, seleksi, kesesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan, hingga penempatan tenaga kerja.

Dengan pendekatan tersebut, program Gampang Kerja diharapkan benar-benar membantu masyarakat sampai mendapatkan pekerjaan, bukan hanya menyediakan informasi mengenai lowongan. (Hab)

POLITIK

Sungai Cimanceuri
Diduga Tercemar Limbah

DPRD TANGERANG MINTA SALURAN INDUSTRI MILENIUM DITUTUP



Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail.

TANGERANG| TRM

Sungai Cimanceuri diduga tercemar limbah hingga berubah hitam dan berbau. DPRD Kabupaten Tangerang meminta saluran pembuangan Industri Milenium ditutup sementara.

DPRD Kabupaten Tangerang meminta Pemerintah Kabupaten Tangerang menutup sementara saluran pembuangan air di Kawasan Industri Milenium, Kecamatan Cikupa, menyusul dugaan pencemaran yang membuat aliran Sungai Cimanceuri berubah menjadi hitam dan berbau menyengat.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail, mengatakan penutupan sementara diperlukan untuk mengendalikan dan meminimalkan dampak dugaan pencemaran lingkungan, khususnya terhadap masyarakat Desa Budimulya, Kecamatan Cikupa.

“Untuk pengendalian dan meminimalisir indikasi pence-

maran itu, kita minta kepada pihak Pemerintah Daerah selaku yang punya tugas dan tupoksinya untuk menutup sementara,” ujar Kholid, Selasa (29/9/2026).

Menurut Kholid, penghentian sementara saluran pembuangan dilakukan hingga Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang menyelesaikan uji laboratorium terhadap sampel air Sungai Cimanceuri.

DPRD Kabupaten Tangerang juga meminta Pemkab Tangerang melakukan audit terhadap perizinan dan legalitas pembuangan Kawasan Industri Milenium.

Audit tersebut mencakup tata letak kawasan, pendataan tenant yang beroperasi, jenis

produksi, serta jalur pembuangan limbah berdasarkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

“Setiap kawasan diwajibkan memenuhi syarat normatif dan teknis yang tertuang dalam dokumen AMDAL sebelum menjalankan kegiatan operasionalnya,” tegas Kholid.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Tangerang, Deden Umardani memberikan ultimatum ke pembuang Kawasan Industri Milenium. “Ini bukan sekadar air aliran Sungai Cimanceuri yang berubah menjadi hitam dan kotor. Tapi juga sudah abai dengan visi-misi Kabupaten Tangerang,” katanya.

Direktur PT Bumi Citra Permai selaku pembuang Kawasan Industri Milenium, Wagiman Tanto, mengatakan pihaknya telah menutup sebagian saluran pembuangan yang diduga menjadi sumber pencemaran.

“Kita udah tutup sebagian yang tercemar sebagai langkah

antisipasi agar dampaknya tidak meluas,” kata Wagiman.

Ia mengeklaim pengelola selama ini telah memenuhi kewajiban administratif dan rutin melaporkan operasional kawasan kepada DLHK Kabupaten Tangerang.

Namun, berdasarkan dugaan sementara dari pihak pengelola, pencemaran tersebut berkaitan dengan aktivitas salah satu tenant di dalam kawasan yang diduga melanggar aturan.

“Dugaan kami sementara baru satu tenant, udah jelas (dugaan pelanggaran), saya gak bisa sebut yah,” ujarnya.

Keterangan tersebut masih berupa dugaan dan belum menjadi kesimpulan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pencemaran Sungai Cimanceuri. Pemeriksaan dan uji laboratorium DLHK menjadi bagian penting untuk mengetahui kondisi serta sumber pencemaran secara lebih lanjut.

Sebelumnya, kondisi Sungai Cimanceuri dikeluhkan

warga Desa Budimulya, Kecamatan Cikupa. Salah seorang warga, Muhammad Ari, mengatakan air sungai berubah menjadi hitam pekat dan mengeluarkan bau menyengat.

“Sudah beberapa minggu ini air sungai menyusut, lalu berubah warna menjadi hitam pekat. Bahkan, mengeluarkan aroma bau yang sangat tidak sedap. Kayanya terkontaminasi oleh limbah industri di Kawasan Milenium,” keluh Ari.

Warga juga menghadapi penyusutan debit air sungai. Kondisi tersebut disebut semakin terasa ketika terjadi kemarau sehingga perubahan kualitas air menjadi perhatian masyarakat sekitar.

DPRD Kabupaten Tangerang kini meminta langkah pengendalian dilakukan sembari menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Hasil pengujian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi air Sungai Cimanceuri dan menjadi dasar untuk menentukan langkah penanganan berikutnya. (Hab)

DPRD Kota Tangerang Dorong Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

TANGERANG | TRM

DPRD Kota Tangerang mendorong penguatan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui edukasi masyarakat dan peningkatan kapasitas pendamping di tingkat wilayah.

Wakil Ketua I DPRD Kota Tangerang, Andri Septiawan Permana, mengatakan upaya pencegahan perlu dilakukan sedini mungkin, mulai dari lingkungan keluarga hingga sekolah.

Hal tersebut disampaikan saat menjadi narasumber dalam Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus serta Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang digelar DP3AP2KB Kota Tangerang di Gedung Nyimas Melati, Selasa (29/9/2026).

Kegiatan tersebut diikuti Satgas PPA tingkat kecamatan, UPTD PPA, serta kader dan aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) se-Kota Tangerang.

Menurut Andri, peningkatan kemampuan para pendamping menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di tingkat masyarakat.

“Digitalisasi ternyata juga berdampak terhadap peningkatan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Karena itu, pros-



Ketua Komisi II DPRD Tangsel, Ricki Yuanda.

es pendampingan harus diawali dengan edukasi kepada masyarakat dan pencegahan sejak dini, dari dalam rumah maupun sekolah,” ujar Andri.

Andri menegaskan, persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak seharusnya hanya dipandang berdasarkan jumlah kasus yang tercatat dalam laporan.

Menurutnya, setiap kasus menyangkut persoalan kemanusiaan dan masa depan korban sehingga membutuhkan perhatian serta perlindungan yang serius.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah terus memperkuat sistem pencegahan sekaligus pendampingan bagi korban di tingkat wilayah.

Andri juga mendorong Pemkot

Tangerang meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan, dalam menangani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Koordinasi tersebut dinilai diperlukan agar penanganan kasus dapat berjalan secara optimal dan proses hukum terhadap pelaku dapat dilakukan sesuai ketentuan.

“Yang paling penting adalah perlunya komunikasi dan kerja sama terkait penyelesaian konkret dengan aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, agar juga mempunyai efek jera,” katanya. (Hab)

PEMBERITAHUAN

LANGGANAN TAHUN 2026
TANGERANG RAYA

■ LANGGANAN CETAK
1 Bulan Rp.85.000

■ LANGGANAN EPAPPER
1 Bulan Rp.40.000
6 Bulan Rp.200.000
1 Tahun Rp.400.000

Pembayaran Langsung
ke Rek. PT.Media Tangerang Raya,
BJB 0069985653001 a/n PT. MEDIA TANGERANG RAYA

TANGERANG RAYA

Bayar Sekali
Per Tahun

TANGERANG RAYA

Ketua DPRD Tangsel: Media
Dukung Pendidikan Demokrasi

TANGERANG RAYA

Teken MoU Tangani
Hukum DATUN

TANGERANG RAYA

Sidak Berkelanjutan Lapor
Publik di MUI: Aneka MUI

Pemkot Tangerang Tembus 5 Besar Nasional PPD 2026

TANGERANG | TRM

Pemerintah Kota Tangerang kembali menorehkan capaian di tingkat nasional. Dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2026, Kota Tangerang berhasil menempati peringkat ke-4 terbaik dari 86 kota di Indonesia.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dalam rangkaian penyerahan PPD Tahun 2026, Rabu (30/9/2026). Penghargaan diterima langsung Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang, Hj. Yeti Rohaeti. Capaian tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kota Tangerang yang diarahkan secara terukur, inovatif, serta menyesuaikan kebutuhan masyarakat.

Kepala Bappeda Kota Tangerang, Hj. Yeti Rohaeti, mengatakan raihan peringkat ke-4 nasional menjadi kebanggaan sekaligus dorongan bagi Pemerintah Kota Tangerang untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan.

Alhamdulillah, Kota Tangerang berhasil meraih posisi ke-4 terbaik se-Indonesia dari 86 kota yang mengikuti ajang Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2026. Ini tentu menjadi kebanggaan sekaligus

apresiasi atas kerja bersama seluruh perangkat daerah dan stakeholder dalam menjalankan pembangunan di Kota Tangerang, ujar Yeti.

Ia menuturkan, penghargaan tersebut tidak semata-mata menjadi capaian, tetapi juga menjadi bahan evaluasi dan motivasi agar perencanaan pembangunan semakin mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat perencanaan pembangunan yang terukur, inovatif, dan berkelanjutan. Yang paling penting adalah bagaimana setiap kebijakan dan program yang direncanakan dapat diimplementasikan dengan baik serta memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat, tambahnya.

Dalam proses penilaian PPD 2026, Pemerintah Kota Tangerang memaparkan sejumlah inovasi pembangunan, salah satunya melalui program Gampang Sekolah.

Program tersebut menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah dalam memper-



luas akses pendidikan. Kebijakan ini juga dikaitkan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pencapaian pembangunan di berbagai sektor.

Program Gampang Sekolah turut diperkuat melalui sejumlah kebijakan, antara lain sekolah swasta gratis, Beasiswa Tangerang Cerdas, dan penguatan pendidikan inklusi. Berbagai kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Tangerang memperlu-

as akses masyarakat terhadap layanan pendidikan.

Yeti menegaskan, capaian dalam PPD 2026 bukanlah akhir dari proses pembangunan, melainkan menjadi momentum untuk terus melakukan evaluasi dan inovasi.

Capaian ini tentu menjadi penyemangat bagi kami untuk terus berbenah dan melakukan inovasi. Ke depan, perencanaan pembangunan akan terus kami arahkan agar semakin responsif terhadap

kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan dampak yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang, pungkasnya.

Dengan menempati peringkat ke-4 dari 86 kota peserta PPD 2026, Pemerintah Kota Tangerang menyatakan akan terus memperkuat kesinambungan pembangunan melalui perencanaan yang terukur, inovatif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat. (wil/dam)

BLK Kota Tangerang Gelar Pelatihan Teknisi AC 2026

TANGERANG | TRM

Guna mencetak sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan berdaya saing, Dinas Ketenagakerjaan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Tangerang menggelar Pelatihan Teknisi AC Tahun 2026 di UPTD BLK Cipondoh sebanyak 16 peserta.

Program pelatihan ini, diselenggarakan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran serta memfasilitasi warga agar memiliki keahlian teknis yang sangat dibutuhkan di pasar kerja maupun dunia usaha mandiri.

Kepala BLK Kota Tangerang Yasin Surya menerang-



kan, pelatihan ini mengusung metode pembelajaran komprehensif yang memadukan pendalaman teori serta porsi praktik lapangan yang dominan.

“Dalam kegiatan praktik, peserta mendapatkan pembelajaran secara langsung mengenai seluruh tahapan pemeliharaan unit AC. Mulai dari pemeriksaan kondisi

komponen, pembersihan unit indoor dan outdoor, pengecekan sistem kelistrikan, hingga pemeriksaan tekanan refrigeran untuk memastikan kinerja AC dapat beroperasi secara optimal,” papar Yasin.

Ia menjelaskan, simulasi dan praktik langsung ini dirancang untuk melatih sensitivitas teknis para peserta. Melalui pelatihan ini, peserta dibekali pengalaman nyata dalam mengidentifikasi potensi gangguan serta melakukan tindakan perawatan yang tepat untuk menjaga performa sekaligus memperpanjang usia pakai unit AC.

“Dengan metode penggabungan teori dan praktik

langsung tersebut, para peserta diharapkan tidak hanya mahir secara teknis, tetapi juga mampu bekerja secara sistematis, presisi dan selalu mengedepankan standar keselamatan kerja (K3),” kata Yasin.

Melalui penyelenggaraan ini, BLK Kota Tangerang terus berkomitmen menghadirkan program-program pelatihan vokasi berkualitas. Hasil lulusan pelatihan ini diharapkan dapat segera terserap di berbagai sektor industri, instansi, maupun berani melangkah menjadi wirausahawan mandiri di bidang jasa perawatan AC. (wil/dam)

Wabup Intan Dorong Dunia Usaha Perkuat Kelola Sampah

TANGERANG | TRM

Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam memperkuat pengelolaan sampah sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Tangerang.

Hal tersebut disampaikan Wabup Intan saat menghadiri sekaligus membuka Workshop Kepatuhan Perusahaan dalam Pengelolaan Sampah yang digelar PT Japfa Food Indonesia, Rabu (30/9/2026).

“Penguatan kolaborasi, komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dan dunia usaha harus terus dilakukan agar pengelolaan sampah dan kelestarian lingkungan dapat sama-sama dijaga yang pada akhirnya juga bermanfaat serta berdampak luas,” ujar Wabup Intan.

Dalam sambutannya, Intan menilai dunia usaha memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Peran tersebut tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup upaya menjaga kualitas lingkungan.

Menurutnya, pengelolaan sampah dan kelestarian lingkungan merupakan tang-

gung jawab bersama yang perlu dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan agar memberikan dampak nyata.

“Pengelolaan sampah dan kelestarian lingkungan ini merupakan tanggung jawab bersama. Peningkatan kepedulian, perubahan kebiasaan, serta penerapan inovasi di lingkungan perusahaan menjadi salah satu kunci keberhasilan yang berdampak nyata bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat,” tandasnya.

Wabup Intan juga mengapresiasi inisiatif PT So Good Manufacturing dalam menyelenggarakan workshop tersebut. Kegiatan itu dinilai dapat menjadi ruang untuk membangun kesamaan pemahaman, meningkatkan kepedulian, sekaligus memperkuat komitmen seluruh pihak dalam mewujudkan pengelolaan sampah dan lingkungan yang lebih baik.

Ia berpesan agar seluruh peserta memanfaatkan workshop sebagai ruang untuk belajar, berdiskusi, dan berbagi pengalaman. Menurutnya, kegiatan tersebut juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan sekaligus mendorong lahirnya inovasi

dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tangerang.

Yang kita harapkan bukan hanya bertambahnya pengetahuan setelah mengikuti workshop ini, tetapi adanya perubahan yang dapat dirasakan dalam pelaksanaan sehari-hari. Mulai dari bagaimana kita memperlakukan sampah, membangun kebiasaan yang lebih peduli lingkungan, sampai bagaimana perusahaan dapat terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan lingkungannya,ujarnya.

Selain itu, Intan mengapresiasi sinergi yang telah terjalin antara PT So Good Manufacturing dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam bidang lingkungan.

“Saya berharap kerja sama yang telah dilakukan dapat terus dikembangkan melalui berbagai kegiatan dan inovasi di bidang lingkungan, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan di lingkungan perusahaan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar,” pungkasnya.

Sementara itu, Head of HRBP Manufacturing PT Japfa Food Indonesia, Agung Wahyu Wibowo, mengapresiasi dukun-



gan Pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

Ia berharap dukungan, arahan, dan sinergi yang selama ini terjalin dapat terus diperkuat sehingga menjadi dorongan bagi perusahaan dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.

Kami berharap ke depan hubungan dan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang semakin erat. Dengan dukungan dan arahan dari pemerintah, kami semakin percaya diri menghadapi berbagai tantangan, baik kompetisi maupun regulasi yang akan datang,ungkapnya.

Pada kesempatan yang

sama, Deputy Head of Sustainability PT Japfa Food Indonesia, Mardian, mengatakan pengelolaan lingkungan merupakan bagian dari komitmen dan tanggung jawab perusahaan atas penggunaan energi, material, dan air dalam kegiatan operasional perusahaan.

Kami menyadari sebagai perusahaan yang beroperasi dari hulu hingga hilir, tentunya harus memberikan dampak lingkungan. Kami harus bertanggung jawab untuk mengelola berbagai dampak yang muncul, baik dari penggunaan energi, penggunaan material, penggunaan air yang menghasilkan sampah atau limbah,ujarnya. (wil/dam)

BANTUAN

Kekeringan, BPBD Telah Salurkan 84.750 Liter Air Bersih



TANGERANG | TRM

Pemerintah Kota Tangerang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus merespons dampak kekeringan dengan menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat. Hingga saat ini, sebanyak 84.750 liter air bersih telah didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan warga di sejumlah wilayah.

Distribusi air bersih tersebut menjadi bagian dari langkah cepat Pemkot Tangerang dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah kondisi cuaca kering yang berpotensi menyebabkan keterbatasan akses air bersih, ungkap Kepala BPBD Kota Tangerang Mahdiar, Rabu (30/9/26).

BPBD Kota Tangerang melakukan pendistribusian berdasarkan laporan dan kebutuhan masyarakat di wilayah yang terdampak. Bantuan disalurkan menggunakan armada tangki air untuk menjangkau permukiman yang membutuhkan pasokan air bersih.

Selain mendistribusikan air, BPBD juga terus melakukan pemantauan terhadap kondisi wilayah dan potensi dampak kekeringan. Masyarakat diimbau untuk menggunakan air secara bijak serta segera melaporkan apabila mengalami kesulitan mendapatkan air bersih,™ katanya.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari kesiapsiagaan Pemkot Tangerang dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi. Kondisi cuaca kering dapat meningkatkan risiko kekurangan air sekaligus memicu berbagai kejadian lain, termasuk kebakaran di lahan kosong, tumpukan sampah dan area dengan vegetasi kering.

BPBD terus melakukan pemantauan dan pendistribusian air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Kami mengimbau warga yang mengalami kesulitan air bersih untuk segera berkoordinasi dengan pihak terkait agar dapat ditindaklanjuti, ujar Mahdiar. (wil/dam)

Lebih Dari 25 Event, Kota Tangerang Makin Sporty



TANGERANG | TRM

Dunia olahraga di Kota Tangerang terus berkembang. Lebih dari 25 event olahraga digelar dalam setahun, mulai dari kompetisi tingkat nasional hingga event yang melibatkan peserta dari berbagai negara.

Kondisi ini memperkuat arah Kota Tangerang untuk membangun ekosistem Sport City yang tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Sejumlah event olahraga berskala nasional telah digelar di Kota Tangerang. Di antaranya Open Tournament Piala Kapolri Karate, Silat Open Nasional, futsal perempuan profesional, hingga panjat tebing nasional. Berbagai kegiatan tersebut turut menjadikan Kota Tangerang sebagai salah satu daerah yang aktif menjadi tuan rumah kompetisi olahraga, ungkap Kepala Dispora Kota Tangerang Kaonang, Rabu (30/9/26).

Ia menyatakan, pengembangan olahraga di Kota Tangerang juga diarahkan tidak hanya pada penyediaan tempat latihan. Pemerintah Kota Tangerang mendorong venue olahraga agar mampu menjadi lokasi penyelenggaraan event nasional maupun internasional.

Yakni, dengan fasilitas yang representatif, mulai dari arena pertandingan, ruang ganti, ruang technical meeting, area VVIP, toilet hingga tempat ibadah, jelasnya.

Sejumlah fasilitas olahraga disebut telah disiapkan untuk mendukung agenda tersebut. GOR Nambo dan GOR Gondrong menjadi bagian dari venue yang diarahkan untuk penyelenggaraan event berskala besar.

Selain itu, pada 2027 direncanakan pembangunan GOR di kawasan Modernland untuk cabang basket indoor dan hoki indoor.

Tidak hanya kompetisi, Kota Tangerang juga menjadi lokasi penyelenggaraan event olahraga yang memadukan aktivitas olahraga dan hiburan. Salah satunya kegiatan lari yang menghadirkan atlet nasional serta peserta dari sejumlah negara Eropa, katanya.(wil/dam)

SDN Telagasari Kekurangan Ruang Kelas

363 SISWA HARUS BELAJAR
BERGANTIAN



Kepala SDN Telagasari, Kecamatan Cikupa, Omay Ismaya, saat mengadu ke DPRD Kabupaten Tangerang.

TANGERANG | TRM

SD Negeri Telagasari, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, masih menghadapi keterbatasan ruang kelas dan kekurangan tenaga pendidik. Kondisi tersebut membuat sekolah harus mengatur kegiatan belajar mengajar secara bergantian.

Kepala SDN Telagasari Omay Ismaya mengatakan, jumlah peserta didik di sekolahnya mencapai 363 siswa berdasarkan data per 31 Agustus 2026. Jumlah tersebut terbagi dalam 11 rombongan belajar (rombel), sementara sekolah hanya memiliki sembilan ruang kelas.

“Jumlah siswa 363 berdasarkan data per 31 Agustus kemarin. Kemudian kelasnya ada 11, sementara ruang kelas atau ruang belajar ada sembilan,” kata Omay saat mengikuti rapat dengan pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten Tangerang, Rabu (30/9/2026).

Keterbatasan ruang kelas membuat pihak sekolah harus mengatur jadwal pembelajaran secara bergantian. Sebagian kegiatan belajar mengajar bahkan harus dilaksanakan pada siang hingga sore hari. Menurut Omay, kondisi tersebut kurang efektif bagi proses pembelajaran, terutama bagi siswa yang memperoleh jadwal belajar hingga sore.

“Kami mengharapkan tidak ada lagi pembelajaran di siang hari. Sehubungan dengan jumlah rombel, nanti ada kelas yang belajar sore. Ini sangat tidak efektif untuk kegiatan-kegiatan,” ujarnya.

Karena itu, pihak sekolah berharap penambahan ruang kelas dapat segera dilakukan sehingga seluruh siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan jadwal yang lebih ideal.

Selain persoalan ruang kelas, Omay mengungkapkan bahwa sejumlah bagian bangunan sekolah juga membutuhkan perhatian.

Pihak sekolah selama ini berupaya melakukan perawatan secara bertahap menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), terutama untuk memperbaiki bagian plafon dan lantai ruang kelas.

“Kami selaku yang mengisi ruangan itu selalu berupaya terus untuk merawat bagian-bagian yang dianggap akan menghambat suasana belajar di sekolah,” katanya. (Hab)

SMKN 5 Kota Tangerang Gelar LDK

LIBATKAN TNI-POLRI SEJAK
3 TAHUN LALU



Siswa SMK Negeri 5 Kota Tangerang tengah serius mengikuti proses belajar mengajar.

TANGERANG | TRM

SMKN 5 Kota Tangerang menyatakan mendukung kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten terkait penguatan pembinaan karakter dan kedisiplinan siswa dengan melibatkan TNI.

Bagi SMKN 5 Kota Tangerang, pembinaan bersama unsur TNI dan Polri bukan hal baru. Sekolah yang berada di Kecamatan Pinang tersebut telah menjalankan program serupa selama sekitar tiga tahun melalui kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) dan pembinaan kesiswaan.

Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Bidang Kesiswaan SMKN 5 Kota Tangerang, Muhammad Drajat Yulianto, mengatakan kerja sama rutin TNI dan Polri telah dilakukan secara reguler sebagai bagian dari pembentukan karakter siswa.

“SMKN 5 pastinya mendukung kegiatan-kegiatan tersebut. Jika pembinaan standar dari sekolah sudah ada sejak lama, sudah tiga tahun kami menerapkan ini. Mungkin di sana standarnya agak lebih tinggi supaya tujuannya tercapai dan ke depannya menjadi lebih baik lagi bagi siswa-siswi kita,” ujar Drajat, Rabu (30/9/2026).

Drajat menjelaskan, SMKN 5 Kota Tangerang secara konsisten bekerja sama dengan Yonif 203 Jatiuwung dan Polres Metro Tangerang Kota dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan siswa. Program tersebut diberikan secara menyeluruh kepada siswa dalam satu angkatan. Pembinaan dimulai sejak kelas X melalui kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), serta melibatkan pengurus OSIS dan Majelis Perwakilan Kelas (MPK).

“Contohnya kelas 1 atau kelas 10 semua, jadi satu angkatan dapat. Nanti berlanjut ke adik kelasnya lagi, rutin tiap tahun seperti itu,” jelasnya. (Hab)

PENDIDIKAN & KAMPUS

Sekolah Swasta Gratis Harus Diiringi Peningkatan Mutu

BUPATI MAESYAL EVALUASI PROGRAM SEKOLAH SWASTA GRATIS/SETARA TAHUN 2026

TANGERANG | TRM

Bupati Tangerang Maesyal Rasyid menegaskan Program Sekolah Swasta Gratis harus diiringi peningkatan mutu pembelajaran, sarana prasarana, dan kompetensi guru.

Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menegaskan Program Sekolah Swasta Gratis/Setara tidak cukup hanya membebaskan biaya pendidikan. Program tersebut harus diiringi peningkatan mutu pembelajaran, sarana dan prasarana, serta kompetensi tenaga pendidik.

Penegasan itu disampaikan Maesyal saat menghadiri Evaluasi Program Sekolah Swasta Gratis/Setara Tahun 2026 di Hotel Vega Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Senin (28/9/2026).

“Program sekolah gratis tidak hanya soal membebaskan biaya pendidikan. Harus dibarengi dengan peningkatan mutu pembelajaran, sarana dan prasarana, serta kompetensi para tenaga pendidik. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama,” tegas Maesyal.

Maesyal mengatakan, kerja sama Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan lembaga pendidikan swasta menjadi bagian penting dalam memperluas dan memertakan akses pendidikan.

Menurutnya, sekolah swasta memiliki peran strategis dalam memastikan anak-anak



Bupati Tangersng Moch. Maesyal Rasyid saat evaluasi Program Sekolah Swasta Gratis/Setara Tahun 2026.

di Kabupaten Tangerang memperoleh kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak.

“Sekolah swasta bukan sekadar pelengkap, tetapi mitra utama pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di Kabupaten Tangerang. Tanpa peran aktif sekolah swasta, pemerataan akses pendidikan tidak akan tercapai secara optimal,” ujarnya.

Ia juga meminta pengelolaan dana Program Sekolah Swasta Gratis/Setara dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan akuntabel.

Evaluasi program, lanjut Maesyal, menjadi momentum untuk mengidentifikasi berbagai kendala administratif dan operasional yang dihadapi sekolah. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat

menjadi dasar untuk mencari solusi dan menyempurnakan pelaksanaan program.

“Pengelolaan dana harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta tepat sasaran. Kita ingin manfaat program ini benar-benar dirasakan langsung oleh peserta didik dan masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya.

Pada 2026, Program Sekolah Swasta Gratis/Setara mencakup 71 sekolah dasar (SD) dengan total 9.676 peserta didik.

Sementara pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP), program tersebut mencakup 193 sekolah dengan jumlah peserta didik mencapai 27.886 siswa.

Pemerintah Kabupaten Tangerang menyiapkan anggaran sebesar Rp13,989

miliar untuk jenjang SD dan Rp54,010 miliar untuk jenjang SMP.

Dukungan anggaran tersebut diarahkan agar program berjalan tepat sasaran sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah-sekolah swasta.

Dalam kegiatan evaluasi tersebut juga dilakukan penyerahan berkas Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) hasil perbaikan kepada Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

Maesyal mengingatkan kepala sekolah dan pengelola lembaga pendidikan agar memastikan seluruh dokumen administrasi telah lengkap dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Perbaikan berkas NPHD ini merupakan bagian dari

tertib administrasi dan menjadi landasan hukum dalam penyaluran serta pertanggungjawaban dana hibah. Pastikan semua dokumen lengkap dan sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administratif di kemudian hari,” katanya.

Maesyal turut mengapresiasi Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang yang terus melakukan pendampingan kepada sekolah dalam penyempurnaan dokumen NPHD.

“Kita berharap sinergi ini terus diperkuat sehingga Program Sekolah Swasta Gratis/Setara dapat berjalan semakin efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Tangerang,” pungkasnya. (Hab)

SMPN 1 Solear Edukasi Siswa tentang Bahaya Penggunaan Handphone Berlebihan

TANGERANG | TRM

SMPN 1 Solear, Kabupaten Tangerang, terus mengedukasi siswa agar menggunakan handphone secara bijak. Sekolah menilai penggunaan perangkat secara berlebihan dapat mengganggu konsentrasi belajar hingga mengurangi interaksi sosial siswa.

Edukasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran siswa agar tidak terlalu bergantung pada handphone, terutama untuk aktivitas di luar kebutuhan pembelajaran.

Kepala SMPN 1 Solear Tjatur Sugito mengatakan, penggunaan handphone di kalangan pelajar perlu mendapat perhatian dari sekolah dan orang tua.

“Kami terus mengingatkan kepada siswa agar menggunakan handphone secara bijak dan sesuai kebutuhan. Jangan sampai penggunaan handphone justru mengganggu



SMPN 1 Solear melakukan sosialisasi bahaya penggunaan handphone terlalu lama bagi pelajar agar siswa tidak kecanduan menggunakan handphone.

gu kegiatan belajar dan aktivitas sehari-hari,” ujar Tjatur kepada BantenEkspres.co.id, Rabu (20/9/2026).

Menurut Tjatur, handphone memiliki manfaat apabila digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Perangkat tersebut dapat membantu siswa mencari informasi dan mengakses berbagai sumber pengetahuan.

Namun, penggunaannya tetap perlu dikendalikan agar waktu siswa tidak terlalu banyak tersita untuk bermain gim, menonton video, atau menggunakan media sosial.

“Handphone pada dasarnya bisa menjadi sarana yang positif untuk mencari informasi dan mendukung pembelajaran. Tetapi kalau digunakan tanpa batas, tentu

ada dampaknya bagi siswa,” katanya.

Ia menjelaskan, salah satu dampak yang perlu diwaspadai adalah mudahnya siswa terdistraksi. Penggunaan handphone secara berlebihan dapat membuat siswa kesulitan membedakan kapan waktunya belajar dan kapan waktunya menggunakan handphone untuk hiburan. Jangan sampai ketika belajar pikirannya masih tertuju pada handphone,” jelasnya.

Tjatur menambahkan, penggunaan handphone yang tidak terkendali dapat membuat siswa semakin bergantung pada perangkat tersebut. Karena itu, kebiasaan menggunakan handphone perlu mendapat perhatian sejak dini.

“Ketergantungan terhadap handphone harus kita cegah sejak dini. Jangan sampai anak merasa tidak nyaman hanya karena jauh dari handphone. Ini yang harus menjadi perhatian bersama antara sekolah dan orang tua,” ungkapnya.

Selain konsentrasi belajar, penggunaan handphone secara berlebihan juga dapat mengurangi kesempatan siswa untuk berinteraksi secara langsung dengan lingkungan sekitar.

Padahal, interaksi dengan teman, guru, keluarga, dan lingkungan diperlukan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, empati, serta keterampilan sosial siswa.

“Anak-anak tetap membutuhkan interaksi langsung dengan teman, guru, keluarga dan lingkungan. Jangan sampai waktunya lebih banyak dihabiskan dengan layar dibandingkan berkomunikasi secara langsung,” tuturnya. (Hab)

SMPN 1 Cisoka Perkuat Profesionalisme Guru untuk Tingkatkan Kualitas Pembelajaran

TANGERANG | TRM

SMPN 1 Cisoka, Kabupaten Tangerang, terus memperkuat profesionalisme tenaga pendidik sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bagi siswa.

Kepala SMPN 1 Cisoka Setyoko Herlambang mengatakan, guru memiliki peran penting dalam menentukan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Karena itu, guru tidak hanya dituntut menguasai materi, tetapi juga mampu memberikan pendampingan dan pelayanan pendidikan sesuai kebutuhan siswa.

“Guru itu harus siap memberikan pelayanan pendidikan kepada siswa. Bukan hanya datang ke kelas dan menyampaikan materi, tetapi bagaimana guru bisa mendampingi, membimbing, dan membantu siswa memahami pembelajaran,” ujar Setyoko

kepada Tangerang Ekspres, Selasa (29/9/2026).

Setyoko menyebutkan, seluruh tenaga pendidik di SMPN 1 Cisoka telah memiliki kompetensi dan keahlian sesuai bidang masing-masing. Kondisi tersebut menjadi salah satu modal sekolah dalam memberikan pembelajaran yang berkualitas.

“Alhamdulillah, guru-guru yang ada di SMPN 1 Cisoka semuanya sudah memiliki kompetensi dan keahlian dalam bidangnya masing-masing. Ini menjadi kekuatan bagi sekolah dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada siswa,” katanya.

Menurutnya, kompetensi dan profesionalisme guru tetap perlu dikembangkan seiring perubahan dalam dunia pendidikan. Guru harus mampu beradaptasi dengan perkembangan kurikulum dan metode pembelajaran.

“Guru harus terus belajar dan meningkatkan kemampuan. Kurikulum dan pola pembelajaran terus berkembang, sehingga guru juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut,” jelasnya.

Setyoko mengatakan, penerapan Kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi guru untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih sesuai dengan karakter dan kebutuhan siswa.

Karena itu, guru dituntut memahami konsep pembelajaran sekaligus mampu menerapkannya secara efektif di dalam kelas.

“Kita ingin pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga bagaimana siswa bisa aktif, memahami apa yang dipelajari, dan mampu mengembangkan potensi yang mereka miliki,” ungkapnya.



SMPN 1 Cisoka terus meminta seluruh guru profesional dalam memberikan pelayanan kepada siswa.

Ia menambahkan, kualitas pelayanan pendidikan tidak hanya bergantung pada guru, tetapi juga membutuhkan kerja sama seluruh unsur sekolah. Kolaborasi antara

guru, siswa, dan lingkungan sekolah diperlukan untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan mendorong siswa berkembang.

(Hab)

Itjen Kemenag Tinjau Pembangunan MAN 1 Lebak

KAWAL KUALITAS PROGRES LAB DAN PERPUS YANG MENCAPAI 49 PERSEN

LEABK | TRM
Pembangunan Laboratorium dan Perpustakaan MAN 1 Lebak mencapai 49,071 persen. Itjen Kemenag mengawal kualitas, administrasi, dan pemanfaatan gedung.

Pembangunan Gedung Laboratorium dan Perpustakaan Tipe 2 MAN 1 Lebak yang bersumber dari dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) telah mencapai progres 49,071 persen. Capaian tersebut tercatat sekitar 4 persen lebih tinggi dibandingkan target yang direncanakan.

Meski progres pembangunan berada di atas target, Inspektorat V Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Itjen Kemenag) tetap melakukan pendampingan untuk memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai kontrak, spesifikasi teknis, serta ketentuan administrasi.

Inspektur V Itjen Kemenag, Muhamad Iqbal, mengatakan pengawasan tidak hanya dilakukan untuk melihat perkembangan fisik bangunan. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga berperan mengidentifikasi dan memitigasi berbagai risiko selama proses pembangunan hingga gedung nantinya digunakan.

“Pembangunan ini diharapkan dapat menghadirkan fasilitas madrasah yang nyaman dan berkualitas. Fasilitas pendidikan yang baik menjadi bagian penting dalam membentuk masyarakat yang cerdas dan pada akhirnya berkontribusi dalam mewujudkan amanat mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Iqbal di Lebak, Banten, Sabtu (26/9/2026).

Iqbal menjelaskan, pendampingan dilakukan secara berkesinambungan mulai dari perencanaan anggaran, pengadaan, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, serah terima hingga tahap pemanfaatan bangunan.

“Kami tidak hanya memotret kondisi pekerjaan pada



Itjen Kemenag Muhammad Iqbal saat meninjau pembangunan MAN 1 Lebak.

saat ini. Pengawasan akan dilakukan secara berkesinambungan sampai dengan tahap pemanfaatan. Kami berharap pendampingan APIP dapat membantu PPK menyelesaikan pekerjaan melalui kolaborasi yang baik dengan penyedia,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari selesainya bangunan secara fisik. Kualitas pekerjaan, kesesuaian spesifikasi, kelengkapan dokumen teknis, administrasi, hingga pertanggungjawaban keuangan juga menjadi bagian yang harus diperhatikan.

“Harapannya, pekerjaan ini bukan hanya selesai secara fisik, tetapi benar-benar sesuai kualitas dan spesifikasinya. Dokumen yang menyertai pekerjaan juga harus lengkap dan pembayaran harus sesuai dengan progres serta ketentuan yang berlaku,” katanya.

Iqbal juga menekankan pentingnya peran konsultan pengawas dalam memastikan

setiap pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak dan spesifikasi teknis.

Konsultan pengawas diharapkan dapat memberikan masukan secara objektif kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga setiap persoalan yang ditemukan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.

“Konsultan pengawas harus memastikan setiap pekerjaan sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis serta memberikan masukan yang tepat kepada PPK. Dengan demikian, PPK memiliki dasar yang kuat untuk memberikan persetujuan maupun mengambil keputusan secara tegas terhadap hal-hal yang harus segera ditindaklanjuti,” ujar Iqbal.

Sementara itu, Pengendali Teknis Reza Stefano mengapresiasi langkah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten yang melibatkan APIP sejak pembangunan masih berlangsung.

Menurut Reza, pelibatan APIP sejak tahap pelaksanaan memungkinkan berbagai persoalan yang ditemukan dapat segera dianalisis dan diberikan rekomendasi sebelum pekerjaan selesai.

“Kami sangat mengapresiasi undangan dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten. Ini menunjukkan bahwa proses planning, organizing, actuating, dan controlling telah berjalan dengan baik. Kami berharap pelaksanaan pekerjaan ini dapat diselesaikan sesuai dengan kontrak,” kata Reza.

Reza juga meminta seluruh pihak terbuka dalam menyampaikan dokumen dan kondisi aktual pekerjaan. Kelengkapan informasi diperlukan agar proses pendampingan dapat menghasilkan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Kami berharap dokumen-dokumen terkait pelaksanaan pekerjaan dapat disampaikan secara lengkap

sehingga dapat kami analisis dengan baik. Dengan begitu, apabila masih terdapat hal yang perlu diperbaiki, rekomendasi dapat segera diberikan mumpung pekerjaan masih berjalan,” ujarnya.

Ia menambahkan, keterbukaan menjadi bagian penting dalam proses pengawasan. Dengan informasi yang lengkap, APIP dapat memberikan rekomendasi secara tepat sasaran.

“Kami berharap tidak ada informasi maupun kondisi yang ditutupi, sehingga kami dapat melihat secara utuh apa yang terjadi di lapangan dan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya,” katanya.

Pendampingan Itjen Kemenag diharapkan dapat menjaga progres pembangunan tetap positif tanpa mengabaikan mutu pekerjaan, kesesuaian spesifikasi, tertib administrasi, dan akuntabilitas keuangan.

(Hab)

PEMERINTAHAN

Pemkab Lebak Siapkan Ruang Fiskal untuk Belanja Publik



Sekda Kabupaten Lebak, Halson Nainggolan.

LEBAK | TRM

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak berpeluang memiliki ruang fiskal lebih besar pada 2027 setelah pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan pemerintah daerah.

Kebijakan tersebut telah disepakati dalam pembahasan APBN 2027. Pemerintah pusat mengalokasikan Rp23 triliun untuk kebutuhan gaji atau honorarium PPPK daerah, yang sebagian besar berasal dari tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebak, Halson Nainggolan, mengatakan Pemkab Lebak masih menunggu petunjuk teknis dan ketentuan resmi terkait mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut di daerah.

“Kami masih menunggu hitam di atas putihnya dari pusat, baik kepastian surat dan juknisnya,” kata Halson, Rabu (30/9/2026).

Selain menunggu petunjuk teknis, Pemkab Lebak juga masih menantikan rincian Transfer ke Daerah (TKD) untuk tahun anggaran 2027. Besaran TKD akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun arah kebijakan APBD Kabupaten Lebak.

Halson mengatakan, apabila pembiayaan gaji PPPK benar-benar ditanggung melalui APBN dan alokasi TKD untuk Kabupaten Lebak tidak mengalami penurunan, anggaran yang sebelumnya disiapkan daerah untuk kebutuhan PPPK dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan prioritas lainnya.

“Jika PPPK digaji dari APBN dan TKD kita tidak turun, maka anggaran untuk PPPK akan dialokasikan untuk pemenuhan mandatory spending dan belanja publik,” ujar mantan Inspektur Inspektorat Lebak tersebut.

Pengalihan beban pembiayaan tersebut berpotensi memberikan ruang bagi Pemkab Lebak untuk mengutar kembali prioritas belanja dalam APBD 2027. (Hab)

Forum PPPK Paruh Waktu Pandeglang Kawal Perpanjangan Kontrak



Pemberian SK pegawai PPPK Paruh Waktu di Alun-alun Pandeglang.

PANDEGLANG | TRM

Forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) Kabupaten Pandeglang akan mengawal proses pemberkasan perpanjangan kontrak kerja tahun 2026. Pengawasan dilakukan untuk memastikan proses administrasi berjalan tertib dan data pegawai sesuai dengan kondisi di lapangan.

Ketua Forum PPPK PW Kabupaten Pandeglang, Andri Priyatna, meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pandeglang lebih cermat dalam melakukan verifikasi dan validasi data.

Menurut Andri, ketelitian diperlukan karena data yang diverifikasi mencakup PPPK paruh waktu dari berbagai bidang, mulai dari tenaga guru, tenaga teknis hingga tenaga kesehatan.

“Pemda dan BKPSDM agar lebih teliti dalam melihat data-data PPPK PW Kabupaten Pandeglang, baik dari guru, tenaga teknis maupun tenaga kesehatan. Jangan sampai orang yang memang sudah tidak aktif di instansinya justru diaktifkan kembali,” ujar Andri Priyatna, Selasa (29/9/2026).

Andri mengatakan, proses validasi tidak seharusnya hanya berfokus pada kelengkapan dokumen. Status keaktifan pegawai di masing-masing instansi juga perlu menjadi bagian dari pemeriksaan.

Forum PPPK PW Pandeglang, kata dia, akan ikut memantau tahapan pemberkasan agar proses administrasi berjalan sesuai data aktual dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Pengawasan tersebut juga diharapkan dapat memastikan dokumen serta persyaratan yang berkaitan dengan perpanjangan kontrak dapat diproses secara tertib. Wakil Ketua Forum PPPK PW Pandeglang, Asef Rifal, mengatakan transparansi dan kecermatan dalam proses verifikasi data menjadi hal penting dalam pemberkasan perpanjangan kontrak.

Menurutnya, keterlibatan forum merupakan bentuk pengawasan dari internal pegawai untuk ikut memastikan proses administrasi berjalan sesuai ketentuan.

“Dengan adanya pengawalan dari Forum PPPK PW Kabupaten Pandeglang, diharapkan proses pemberkasan perpanjangan kontrak PPPK Paruh Waktu dapat berlangsung secara tertib, transparan, dan sesuai dengan kondisi data di lapangan,” ujar Asef.

Forum PPPK PW Pandeglang memastikan pemantauan akan dilakukan hingga seluruh tahapan pemberkasan dan penandatanganan kontrak kerja selesai. (Hab)

Reaktivasi BPJS PBI di Lebak, 8 Dokumen Ini Perlu Disiapkan Warga

LEBAK | TRM

Masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin mengajukan reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) diminta menyiapkan dokumen administrasi sesuai persyaratan.

Informasi tersebut disampaikan Pemerintah Kabupaten Lebak melalui materi sosialisasi mengenai persyaratan reaktivasi BPJS PBI. Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya mendukung cakupan kesehatan masyarakat melalui program Universal Health Coverage (UHC).

Berdasarkan informasi Pemkab Lebak, terdapat delapan dokumen yang perlu disiapkan masyarakat sebelum mengajukan reaktivasi kepesertaan BPJS PBI.

Dokumen pertama yang perlu disiapkan adalah surat permohonan pengaktifan BPJS PBI menggunakan kop desa.

Kedua, masyarakat perlu melampirkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK).

Ketiga, pemohon harus menyiapkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan kop desa. Selanjutnya, dokumen keempat berupa surat keterangan rawat inap dari rumah sakit.

Adapun dokumen kelima adalah fakta integritas dengan kop desa. Kemudian, masyarakat juga diminta menyiapkan foto rumah sebagai dokumen keenam.



Bupati Lebak Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya.

Dokumen ketujuh berupa foto pasien, sedangkan dokumen kedelapan adalah rekening listrik PLN.

Delapan dokumen tersebut perlu dipersiapkan sejak awal agar tidak ada persyaratan yang tertinggal ketika proses pengajuan reaktivasi dilakukan.

Pemerintah Kabupaten Lebak mengimbau masyarakat untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa, terutama terkait dokumen yang harus menggunakan kop desa.

Kelengkapan administrasi dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui dan mempersiapkan seluruh persyaratan sebelum mengajukan reaktivasi kepesertaan BPJS PBI.

Bupati Lebak Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya melalui materi sosialisasi tersebut juga mengajak masyarakat bersama-sama mendukung terwujudnya Lebak Ruhay sekaligus meningkatkan cak-

upan kesehatan masyarakat.

“Kesehatan adalah hak semua. Mari kita wujudkan bersama,” ujar Hasbi.

Informasi mengenai persyaratan reaktivasi BPJS PBI diharapkan dapat membantu masyarakat memahami dokumen yang harus dipersiapkan sekaligus memastikan status kepesertaan jaminan kesehatan dapat diurus sesuai ketentuan.

Bagi warga yang hendak mengajukan reaktivasi, pemeriksaan terhadap delapan dokumen tersebut dapat dilakukan sejak awal. Berkas yang membutuhkan kop desa juga dapat dikordinasikan terlebih dahulu dengan pemerintah desa.

Dengan persiapan administrasi yang lengkap, masyarakat diharapkan lebih mudah mengikuti proses reaktivasi BPJS PBI dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mendukung akses terhadap layanan kesehatan. (Hab)

Dua PNS Pemkab Lebak Kena Sanksi Disiplin, Satu Diberhentikan

LEBAK | TRM

Dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak dijatuhi sanksi disiplin sepanjang 2026. Salah satu di antaranya diberhentikan karena terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lebak, Fakhri Fitriana, mengatakan dua PNS tersebut mendapatkan sanksi berbeda.

Satu PNS dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat, sedangkan satu lainnya dikenai hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

“Ya, di tahun 2026 ini ada dua PNS yang dikenai sanksi berupa pemberhentian dan penurunan pangkat setingkat selama satu tahun,” kata Fakhri, Selasa (29/9/2026).

Fakhri menjelaskan, PNS yang diberhentikan dikenai sanksi setelah tercatat tidak masuk kerja selama 28 hari kerja. Sebelum keputusan sanksi dijatuhkan, yang bersangkutan terlebih dahulu menjalani proses pembinaan.

“PNS yang dijatuhi hukuman pemberhentian karena indisipliner tidak masuk kerja selama 28 hari kerja. Sebelum diberikan sanksi dilakukan pembinaan terlebih dahulu.



Plt BKPSDM Kabupaten Lebak, Fakhri Fitriana.

Bagi yang masih dapat dibina dan tidak melakukan pelanggaran berat maka diberikan sanksi disiplin,” ujarnya.

Menurut Fakhri, pembinaan terhadap aparatur sipil negara (ASN) terus dilakukan, baik melalui organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing maupun BKPSDM Kabupaten Lebak.

Namun, pelanggaran disiplin masih ditemukan setiap tahun dengan tingkat pelanggaran yang beragam, mulai dari kategori ringan, sedang hingga berat. Dalam kasus tertentu, pelanggaran tersebut dapat berujung pada pemberhentian.

Fakhri menyebut jumlah PNS yang dikenai sanksi disiplin pada 2026 lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya.

“Tahun ini jumlah PNS yang terkena sanksi disipliner berkurang dibanding tahun 2025,” katanya.

(Hab)

RAZIA

Satpol PP Kota Tangerang Amankan 4 Pasangan Bukan Suami Istri di Hotel



BPOM

suplemen kesehatan impor ilegal, seperti Youthvita, Magnesium Glycinate, Women's Probiotic, Collagen, serta Calcium Magnesium Zinc.

Untuk kategori kosmetik, beberapa produk yang ditemukan antara lain Sun Cream Purple, Sun Cream Pink, 345 Relief Cream, Vital Spray Serum, dan First Spray Serum.

Produk-produk tersebut tidak memiliki izin edar sehingga belum melalui proses evaluasi BPOM. Dengan demikian, aspek keamanan, mutu, dan manfaat produk belum dapat dipastikan sesuai ketentuan yang berlaku dan berpotensi menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, hasil pengawasan tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terpadu terhadap peredaran produk obat dan makanan, baik melalui jalur online maupun offline.

Hal itu disampaikan Taruna dalam konferensi pers yang digelar di tempat kejadian perkara (TKP), Rabu (30/9/2026).

“BPOM melakukan pengawasan berbasis risiko dari hulu hingga hilir, mulai dari pemasukan, penyimpanan, distribusi, hingga penjualan kepada masyarakat. Informasi dari patroli

siber, kami tindak lanjuti dengan penelusuran lapangan untuk memastikan sumber penyimpanan dan distribusi produk yang diduga ilegal,” urai Taruna Ikrar.

Berdasarkan pemeriksaan dan pendalaman awal, produk-produk tersebut diduga masuk ke Indonesia melalui jasa forwarder umum dengan jalur yang tidak sesuai ketentuan dan/atau tanpa dilengkapi dokumen importasi yang dipersyaratkan.

Produk kemudian diduga disimpan di gudang tersebut sebelum didistribusikan kepada konsumen melalui sejumlah platform online.

Sebagai langkah tindak lanjut, BPOM menghentikan sementara kegiatan pada sarana tersebut dan mengamankan seluruh produk obat bahan alam, suplemen kesehatan, serta kosmetik ilegal dan/atau diduga palsu yang ditemukan.

BPOM juga mengambil sampel sejumlah produk untuk dilakukan pengujian laboratorium guna memastikan kandungan di dalamnya. Selain itu, BPOM berkoordinasi dengan Kepolisian untuk proses penanganan perkara lebih lanjut.

Taruna Ikrar menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya BPOM me-

lindungi masyarakat sekaligus mencegah produk ilegal beredar lebih luas.

“BPOM siap menindak tegas pelaku usaha yang terbukti melanggar peraturan,” tegas Taruna Ikrar.

Pelaku yang terbukti menyimpan dan mendistribusikan produk ilegal tersebut dapat dikenakan ketentuan Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara hingga 12 tahun atau pidana denda maksimal Rp5 miliar.

BPOM mengingatkan pelaku usaha agar mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk terkait persyaratan importasi, perizinan, penyimpanan, dan distribusi produk obat dan makanan.

Kepatuhan terhadap regulasi dinilai penting untuk memastikan produk yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, serta mutu, sekaligus mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.

Masyarakat juga diimbau melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpanan maupun peredaran produk ilegal di ling-

kungan sekitar. Pengaduan dapat disampaikan melalui Contact Center HALOBPOM 1-500-533 atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar, Balai, maupun Loka POM di seluruh Indonesia.

BPOM juga mengingatkan masyarakat agar menjadi konsumen cerdas dengan menerapkan Cek KLIK, yakni memeriksa Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa sebelum membeli atau menggunakan produk.

Khusus untuk pembelian secara online, masyarakat diminta memilih sarana penjualan yang jelas dan tepercaya serta tidak mudah terpengaruh klaim maupun iklan yang berlebihan.

BPOM menyatakan akan terus memperkuat pengawasan dari hulu hingga hilir dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, mulai dari pemantauan peredaran produk di ruang digital hingga pemeriksaan langsung di lapangan.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah produk ilegal menjangkau masyarakat serta memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi ketentuan demi perlindungan kesehatan masyarakat. (dam/mas/hmi)

Sambungan Hal. 1

APBD

disepakati sebesar Rp9,750 triliun. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mencapai Rp7,114 triliun. PAD tersebut terdiri atas pendapatan dari sektor pajak sebesar Rp6,479 triliun, retribusi daerah Rp361,212 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp46,8 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp226,76 miliar.

Selain PAD, struktur

pendapatan daerah juga ditopang pendapatan transfer sebesar Rp2,597 triliun serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp8,457 miliar.

Dengan disetujuinya Raperda Perubahan APBD 2026, tahapan selanjutnya adalah evaluasi oleh Kemendagri sebelum anggaran tersebut ditetapkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (dam/hmi)

Sambungan Hal. 1

ISYARATKAN



kade di level profesional.

Perjalanan Giroud di sepakbola Eropa diwarnai berbagai pencapaian besar. Ia meraih gelar Ligue 1 bersama Montpellier pada 2012 sebelum pindah ke Arsenal pada musim berikutnya.

Bersama Chelsea, Giroud kemudian meraih Liga Europa dan Liga Champions. Ia juga memenangkan Scudetto bersama AC Milan.

Secara keseluruhan, Giroud telah mencetak 303 gol dalam 806 penampilan di level klub. Jumlah tersebut masih berpeluang bertambah sebelum musim terakhirnya berakhir.

Bersama Timnas Prancis, Giroud mencatat 137 penampilan dan mencetak 57 gol.

Ia menjadi bagian dari skuad Prancis yang menjuarai Piala Dunia 2018.

Giroud sebelumnya merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Les Bleus dengan 57 gol. Tapi rekor tersebut kini telah dilewati Kylian Mbappé.

Giroud masih terikat kontrak dengan Lille hingga akhir musim 2026/2027 setelah memperpanjang masa tinggalnya selama satu tahun.

Pada musim ini, Giroud telah tampil dalam enam pertandingan di semua kompetisi dan mencetak satu gol. Ia masih menjadi bagian penting Lille saat klub Prancis tersebut bersaing di Ligue 1 dan Liga Champions. (dts/dam)

Sambungan Hal. 1

JASAD

tikan identitas jasad tersebut. Kepolisian juga mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga atau memiliki informasi yang berkaitan dengan penemuan tersebut untuk segera menyampaikannya kepada

pihak kepolisian.

“Apabila ada masyarakat yang kehilangan anggota keluarga dengan ciri-ciri yang sesuai, kami mengimbau agar segera menghubungi kami untuk membantu proses identifikasi,” pesannya. (hed/dam)

4 PASANGAN

ma operasi razia ada empat pasangan tidak sah atau bukan suami istri yang diamankan petugas,” ujar Teguh, Rabu (30/9/2026).

Teguh mengatakan, terhadap para pihak yang diamankan, Satpol PP memberikan sanksi berupa teguran serta pembinaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

“Kami sudah memberikan sanksi teguran tegas untuk ke depannya akan dilakukan pembinaan agar para pelanggar tidak mengulangi perbuatan yang

sama,” tambahnya.

Satpol PP Kota Tangerang juga menyatakan akan kembali melakukan operasi serupa di sejumlah wilayah lainnya dalam waktu mendatang sebagai bagian dari penegakan Perda.

“Kami mengajak semua masyarakat berpartisipasi menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan dengan aktif memberikan laporan jika menemukan aktivitas yang terindikasi melanggar Perda,” pungkasnya. (wil/dam)

Sambungan Hal. 8

3.433 PPPK

pala BKPSDM Lebak, Fakhri Fitriana, mengatakan perpanjangan perjanjian kerja terhadap ribuan PPPK paruh waktu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkab Lebak.

Menurutnya, keberlanjutan perjanjian kerja tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan administrasi. Evaluasi juga

mencakup pelaksanaan tugas, disiplin kerja, serta kepatuhan pegawai terhadap ketentuan kedisiplinan.

“Belum bisa dipastikan, masih menunggu hasil evaluasi. Kontrak PPPK itu tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan administrasi, tetapi juga rekam tugas, disiplin kerja, dan kepatuhan terhadap aturan kedisiplinan,” ujarnya. (eem/dam)

DIMYATI

Dimiyati mengapresiasi kehadiran generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan pariwisata Banten. Ia menilai generasi muda sebagai penerus memiliki sejumlah potensi untuk berkontribusi, di antaranya idealisme, dedikasi, serta rasa memiliki terhadap daerah.

Selain itu, generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam merespons berbagai perkembangan dan situasi yang terjadi, termasuk dalam memperkenalkan potensi pariwisata kepada masyarakat luas.

Karena itu, Dimiyati berharap BMPP dapat ikut mengambil bagian dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal. Salah satunya dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi sekaligus membantu memperkenalkan berbagai

destinasi wisata unggulan di Banten.

“Kita harus menumbuhkan potensi daerah agar berdaya guna dan bermanfaat, serta menjadikan tempat wisata sebagai wadah untuk saling asah, asih, dan asuh,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua BMPP Cory Cika Agustina mengatakan organisasinya akan menjadi wadah inkubasi bagi kreator konten digital di bidang pariwisata, khususnya kalangan anak muda Banten.

Cory menjelaskan, salah satu program unggulan BMPP ke depan adalah melakukan kunjungan dan pembinaan ke sejumlah sekolah serta perguruan tinggi.

“Kami berfokus untuk melahirkan kreator-kreator konten pariwisata yang berkualitas,” ucapnya. (hed/dam)

Sambungan Hal. 1

dengan baik untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan,” tutupnya.

Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, Senin (28/9/2026), Penatua Rumah Doa GKPI Rajeg, Surya Sarjono Lumban Gaol, menyampaikan bahwa rumah doa GKPI Rajeg direlokasi ke lokasi baru di kawasan Kota Sutera, Pasar Kemis.

“Rumah Doa GKPI Tangerang dipindah ke daerah Kota Sutera, Pasar Kemis,” ujar Surya Sarjono Lumban Gaol.

Sarjono mengatakan, seluruh persiapan untuk pelaksanaan ibadah di rumah doa baru telah selesai dilakukan. Menurutnya, rumah doa tersebut siap digunakan kembali untuk kegiatan peribadatan mulai Minggu pekan tersebut.

“Persiapan telah dilakukan, ibadah Minggu pekan ini sudah bisa dilakukan di rumah doa baru,” ujarnya. (dam)

kasih,” tegasnya.

Ia menambahkan, sikap saling mengasihi dan mengampuni menjadi hal yang diutamakan agar seluruh pihak dapat menahan diri dan berjalan bersama dalam membangun wilayah.

“Kita saling mengasihi, saling mengampuni, itu jauh lebih baik dari apa pun itu. Ketika kita sudah saling mengampuni, saling mengasihi, saya kira kita dapat berjalan bersama untuk membangun kecamatan kita ini,” imbuhnya.

Henri juga menyampaikan salam hormat serta ucapan terima kasih kepada pimpinan daerah yang telah memberikan perhatian kepada jemaat GKPI.

“Salam ke Pak Bupati juga yang sangat perhatian dengan kami, dan Pak Camat, dan semua aparat pemerintah kita di daerah ini. Kiranya tempat yang sudah disediakan itu dapat digunakan

Menutup arahnya, Soma mendoakan seluruh kafilah agar diberikan kelancaran, kesehatan, serta hasil terbaik selama mengikuti FASI tingkat Provinsi Banten.

“Selamat berjuang, selamat bertanding, jaga nama baik Kabupaten Tangerang, dan berikan penampilan terbaik,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Pelepasan Kafilah FASI BKPRMI, Sarwoko, mengatakan kontingen Kabupaten Tangerang diisi puluhan peserta pilihan dari berbagai wilayah.

“Kegiatan ini diikuti oleh 54 peserta, didukung oleh 16 official, serta 10 pengurus DPD BKPRMI Kabupaten Tangerang,” ujar Sarwoko.

Ia menjelaskan, festival yang diselenggarakan DPD BKPRMI

Sambungan Hal. 8

54 SANTRI

diri, junjung tinggi akhlak dan sportivitas, serta pulanglah membawa pengalaman dan kebanggaan bagi Kabupaten Tangerang. Ingatlah bahwa prestasi akan menjadi lebih bermakna apabila dibangun bersama akhlak yang mulia,” ujar Soma.

Ia juga mengingatkan para peserta agar tidak menjadikan kemenangan sebagai satu-satunya tujuan. Keberanian untuk tampil, kedisiplinan dalam berlatih, proses belajar, serta kesempatan mempererat silaturahmi juga menjadi bagian penting dari pengalaman mengikuti FASI.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Tangerang akan terus mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM), khususnya melalui penguatan pendidikan keagamaan dan pembinaan generasi muda.

Upaya tersebut diarahkan agar generasi muda Kabupaten Tangerang tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, memiliki daya saing, serta mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat.

Soma juga menyampaikan apresiasi kepada Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPD BKPRMI) Kabupaten Tangerang, para ustadz dan ustadzah, guru pembimbing, serta orang tua yang selama ini mendampingi para peserta.

“Peran Bapak dan Ibu sangat penting. Sebab, prestasi anak-anak tidak lahir secara instan, tetapi tumbuh dari pendidikan, keteladanan, doa, latihan, dan pendampingan yang dilakukan secara terus-menerus,” tambahnya.

pengembangan penyidikan, kami kemudian menetapkan satu tersangka lainnya berinisial AZ yang turut berperan aktif membantu proses pengiriman BBL,” ujar Dian, dikutip Wartawan, Rabu (30/9/2026).

Dalam pengungkapan tersebut, penyidik mengamankan satu unit truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BE 8739 NBB. Kendaraan tersebut membawa 30 box styrofoam yang berisi sekitar 150.000 ekor BBL.

Berdasarkan hasil penghitungan bersama Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Banten, BBL yang diamankan terdiri atas 10.000 ekor jenis Mutiara dan 140.000 ekor jenis Pasir.

DUA

menyelesaikan proses penyidikan kasus pengiriman BBL yang sebelumnya diungkap pada Jumat, 4 September 2026, sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Tol Jakarta–Merak Km 71, Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten.

Dirreskrimsus Polda Banten Kombes Pol. Dian Setyawan mengatakan, dalam pengungkapan awal polisi mengamankan seorang tersangka berinisial FIR. Dari hasil pengembangan penyidikan, penyidik kemudian menetapkan AZ sebagai tersangka kedua yang diduga turut membantu dan berperan dalam proses pengiriman BBL tersebut.

“Pada awal pengungkapan, kami mengamankan satu orang tersangka berinisial FIR. Dari hasil

Sambungan Hal. 8



klik

tangerangraya.co

Nikmati Berita Politik Terdepan

Untuk iklan dan Advertorial
Hubungi: 0859-5666-7086

3.433 PPPK Paruh Waktu Lebak Lanjut Kontrak, 37 Gugur



LEBAK | TRM
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak memperpanjang perjanjian kerja sebanyak 3.433 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemkab Lebak.



Perpanjangan tersebut dilakukan setelah masa perjanjian kerja sebelumnya berakhir pada 30 September 2026. Dari total 3.470 PPPK paruh waktu, sebanyak 37 pegawai tidak melanjutkan perjanjian kerja. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi (PPI) Badan Kepegawaian dan Pengem-

banan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lebak, Irvan Pramerta, mengatakan proses administrasi perpanjangan perjanjian kerja mulai dilakukan setelah masa perjanjian sebelumnya berakhir. "Proses perpanjangan kontrak mulai dilakukan setelah masa perjanjian kerja berakhir pada 30 September 2026. Proses administrasi perpanjangan dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai

dengan hasil evaluasi kinerja pegawai. Per 1 Oktober sudah mulai proses perpanjangan dan itu dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah," ujar Irvan, Rabu (30/9/2026). Irvan menjelaskan, terdapat sejumlah alasan yang menyebabkan 37 PPPK paruh waktu tidak melanjutkan perjanjian kerja. Di antaranya karena meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, mengundurkan diri, hingga menda-



Dimyati Ajak Generasi Muda Majukan Pariwisata

SERANG | TRM
Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah mendorong generasi muda untuk mengambil peran dalam mengembangkan sekaligus melestarikan potensi pariwisata di Provinsi Banten. Menurut Dimyati, Banten memiliki kekayaan destinasi wisata yang beragam. Potensi tersebut perlu terus dikembangkan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan sehingga tidak hanya memperkuat sektor pariwisata, tetapi juga ikut menggerakkan perekonomian masyarakat dan daerah. "Provinsi Banten adalah destinasi wisata. Semoga ke depannya Banten terus tumbuh menjadi destinasi wisata unggulan. Kalau wisata tumbuh, lingkungan dan perekonomian masyarakat juga akan ikut tumbuh," kata Dimyati saat menghadiri Pelantikan Banten Muda Penggiat Pariwisata (BMPP) di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu (30/6/2026).

» Baca 3.433 PPPKHal. 7

» Baca DIMYATIHal. 7

54 Santri Tangerang Siap Berlaga di FASI Banten



TANGERANG | TRM
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, melepas kontingen kafilah Festival Anak Soleh Indonesia (FASI) Kabupaten Tangerang yang akan berlaga pada tingkat Provinsi Banten. Pelepasan berlangsung di Masjid Al-Amjad, Kabupaten Tangerang, Rabu (30/9/2026). Dalam arahannya, Soma menegaskan bahwa FASI tidak sekadar menjadi ajang perlombaan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun generasi muda yang memiliki fondasi keaga-

maan dan karakter yang kuat. "FASI bukan sekadar ajang perlombaan. Lebih dari itu, FASI merupakan bagian penting dari ikhtiar kita dalam membangun generasi yang memiliki keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, kecintaan terhadap Al-Qur'an, serta kemampuan untuk mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari," ujar Soma Atmaja di hadapan para peserta, pembina, dan orang tua santri. Pemerintah Kabupaten Tangerang, kata Soma, menyambut baik sekaligus memberikan apresiasi atas keikut-

sertaan para santri yang menjadi perwakilan daerah dalam FASI Tingkat Provinsi Banten Tahun 2026. Kepada para peserta, ia berpesan agar menjaga kepercayaan diri sekaligus nama baik daerah selama mengikuti perlombaan. Para santri dinilai tidak hanya membawa nama pribadi maupun lembaga pendidikan, tetapi juga membawa nama Kabupaten Tangerang. "Anak-anakku yang saya banggakan, berangkatlah dengan doa, tampilkan kemampuan dengan percaya

» Baca 54 SANTRIHal. 7

Dua Tersangka Kasus BBL Dilimpahkan ke Kejari



SERANG | TRM
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrim-sus) Polda Banten menyerahkan tersangka dan barang bukti atau tahap II perkara dugaan pengiriman ilegal 150.000 ekor Benih Bening Lobster (BBL) kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang. Pelimpahan tersebut dilakukan setelah penyidik

» Baca DUAHal. 7

TANGERANG RAYA



Disewakan
Space Iklan

Langganan Sekarang

Layanan Kami

- Advetorial
- Iklan Lelang
- Iklan Marketing
- Iklan Pemberitahuan
- Iklan Ucapan
- Tayangan Berita

Koran

Mulai dari 1JUTA
Harga ditentukan oleh ukuran, jenis iklan

Website

Mulai dari 500k
Harga ditentukan oleh ukuran, posisi, dan durasi penayangan

Bonus

Setiap Pemasangan di koran, gratis penayangan website (iklan 1hari tayang)



Call Us
+62855-9132-2726

Holding Company
www.rmindonesia.com

Kunjungi Kami di
www.tangerangraya.co.id